



# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyatakan bahwa Rencana Kinerja Tahunan Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan Satuan Kerja disusun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis dan di koordinasikan oleh Biro Perencanaan untuk Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Unit Kerja Direktorat Jenderal.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan memuat indikator kinerja serta target yang ditetapkan dan diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di bidang perhubungan khususnya sub sektor transportasi laut yang disusun pada saat setelah menerima alokasi anggaran.

**Jakarta, Desember 2024**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT**



**LOLLAN PANJAITAN  
NIP. 19710125 199703 1 001**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Meningkatnya dukungan teknis terhadap kualitas tata Kelola unit kerja yang baik di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase kecukupan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	%	100
		IKK 2	Persentase keandalan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	%	92,5
		IKK 3	Persentase layanan bantuan hukum	%	100
		IKK 4	Persentase SDM DJPL yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh DJPL dan BPPTL	%	100
		IKK 5	Persentase monitoring, evaluasi, dan pelaporan	%	100
		IKK 6	Persentase kepatuhan pelaporan kinerja	%	100
		IKK 7	Persentase pencapaian PNBPN	%	100
		IKK 8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	94
		IKK 9	Persentase layanan internal	%	100
		IKK 10	Persentase kegiatan pendukung	%	100
		IKK 11	Persentase penyelesaian penyusunan NSPK	%	100

Meningkatnya dukungan manajemen terhadap kualitas tata Kelola unit kerja yang baik di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 12	Persentase layanan organisasi dan tata Kelola internal	%	100
	IKK 13	Persentase layanan manajemen SDM	%	100
	IKK 14	Persentase pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM	%	100
	IKK 15	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM lingkungan DJPL	%	100
	IKK 16	Persentase layanan perkantoran	%	100
	IKK 17	Persentase layanan umum	%	100
	IKK 18	Persentase layanan perencanaan	%	100
	IKK 19	Persentase layanan anggaran	%	100
	IKK 20	Persentase layanan pemantauan dan evaluasi	%	100
	IKK 21	Persentase layanan kehumasan	%	100
	IKK 22	Persentase layanan data dan informasi	%	100
	IKK 23	Persentase layanan hukum	%	100
	IKK 24	Persentase layanan kerjasama dan kemitraan	%	100
	IKK 25	Persentase perjanjian kerja sama bidang transportasi laut yang disepakati	%	100
IKK 26	Persentase keterlibatan kesekretariatan DJPL dalam kerjasama internasional	%	100	
IKK 27	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	79,5	
IKK 28	Persentase Pencapaian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) yang dilaksanakan	%	100	

		IKK 29	Persentase Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) yang ditindaklanjuti	%	100
		IKK 30	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	82
		IKK 31	Nilai kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik	Nilai	3,8
		IKK 32	Persentase penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi bidang transportasi laut	%	100
		IKK 33	Persentase usulan pemanfaatan BMN yang ditindaklanjuti	%	100
		IKK 34	Nilai AKIP Setditjen Hubla	Nilai	80
		IKK 35	Persentase publikasi informasi melalui media sosial	%	90

Jakarta, Desember 2024

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT**



**LOLLAN PANJAITAN  
NIP. 19710125 199703 1 001**